

AGAMA DALAM MASYARAKAT MODERN: PANDANGAN JÜRGEN HABERMAS

Mahfudz Junaedi

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

mahfudzjunaedi@unsiq.ac.id

Abstrak:

Agama dalam ruang publik dan Agama dalam masyarakat modern dalam pemikiran Jürgen Habermas merupakan dua sisi yang berbeda, tetapi memiliki substansi yang sama, di mana agama ditempatkan pada ruang publik bukan pada ruang privat. Masyarakat modern yang selalu ditandai dengan demokrasi, sekularisasi, dan pluralisme menempatkan agama pada posisi untuk dilakukan pembacaan lain dan pendekatan pada interpretasi yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban modern. Diferensiasi fungsional yang mendorong ke arah individualisasi agama tidak secara niscaya mengimplikasikan hilangnya pengaruh dan relevansi agama, baik dalam arena politik, budaya masyarakat, maupun tingkah laku sehari-hari.

Keyword: *Agama, ruang publik, masyarakat modern, sekularisasi, liberalisme, fundamentalisme.*

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tak dapat dipisahkan dari masyarakat dan kebudayaan di mana ia tumbuh. Pengetahuan hanya bisa berkembang bila ada “kesadaran” untuk mengembangkan, memanfaatkan dan memaknainya dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, pengetahuan tidak hanya persoalan epistemologis, tetapi juga persoalan sosial dan kebudayaan. Dalam konteks sosial, pengetahuan dikatakan “dikonstruksi secara sosial” (*social construction of knowledge*). Dengan perkataan lain, struktur sosial, mentalitas dan nilai-nilai budaya yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat sangat menentukan bentuk, pertumbuhan dan arah perkembangan pengetahuan. Relevan dengan apa yang terjadi pada kondisi sekarang ini, terutama agama dan masyarakat, diibaratkan seperti ikan dan air, keduanya tidak dapat dipisahkan. Masih relevankah sekarang membahas agama di ruang publik atau masyarakat modern sekarang ini?, untuk membahas pertanyaan tersebut, salah satunya adalah pandangan Jurgen Habermas.

Perhatian pemikir filsafat modern Jürgen Habermas¹ akan pentingnya peran agama dalam masyarakat semakin bertambah akhir-akhir ini. Hal ini diungkapkan dalam pidatonya ketika ia mendapat penghargaan dari “*Friedenspreis des deutschen Buchhandels*” (Hadiah Perdamaian dari Perhimpunan Toko Buku Jerman). Pidato ini diprovokasi oleh peristiwa 11 September 2001 dan mengangkat tema lama tentang hubungan antara iman dan pengetahuan (*faith and knowledge*), dan peristiwa tersebut terjadi di antaranya atas keyakinan agama sebagai bentuk dari faham fundamentalisme yang tidak menginginkan pada sekularisasi dan modernitas.² Habermas berpendapat, aksi terorisme pada tanggal 11 September 2001 merupakan salah satu ungkapan dan tindakan nyata ketegangan antara iman (agama) dan ilmu pengetahuan (modernitas-sekular) pada masyarakat atau pada dunia sekular. Iman dan Ilmu pengetahuan, agama dan sekularisasi seolah-olah merupakan dua kekuatan yang tidak pernah bertemu dan saling menghilangkan atau meniadakan.

B. Liberalisme versus Fundamentalisme.

Serangan 11 September 2001 telah melahirkan format baru hubungan politik dunia. Dunia seakan dikotak-kotakkan atas kaum liberalis dan kaum fundamentalis. Kaum liberalis yang diwakili oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat mengagung-agungkan kebebasan. Karenanya mereka berusaha menyebarkan paham tersebut dalam berbagai bentuk mulai dari bidang politik, ekonomi, pendidikan dan berbagai bidang lainnya. Mereka berpikir bahwa apa yang dihidupi dan dikonsepsikan atau dilahirkan di Eropa atau Amerika dapat diterapkan di negara-negara lain (luar Eropa dan Amerika). Sementara kaum fundamentalis yang diwakili para teroris tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya dan

¹ Jürgen Habermas dan pandangannya dalam ceramah yang diadakan oleh Akademi Katolik di München pada 19 Januari 2004. Dua pembicara utama dalam seminar tersebut adalah Jürgen Habermas dan Joseph Ratzinger yang waktu itu adalah Ketua Kongregasi Ajaran Iman Gereja Roma katolik, ceramah Habermas dengan tema: Batas antara Iman dan Pengetahuan. Tentang pengaruh historis dan Makna aktual dari Filsafat Agama Kant. Ketiga, ceramah Habermas tersebut mendapat tanggapan antusias dari berbagai kalangan yang menaruh perhatian pada agama dan kedudukan serta perannya dalam masyarakat demokratis-sekular.

² Samuel P. Huntington, *Benturan Antar peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Yogyakarta: Qalam, 2003, hlm. 36-37

tradisi. Karenanya mereka tidak menginginkan atau meniru antipati terhadap berbagai kemajuan (modernitas) yang dimotori oleh negara-negara penganut paham liberal. Sikap resisten yang kuat pada diri kaum fundamentalis pada gilirannya tidak dapat bertahan dengan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, maupun pendidikan. Karena mereka tidak dapat menghindari dari pengaruh-pengaruhnya.

Berbagai kemajuan yang merupakan ekspansi gaya baru di era modern yang dilakukan oleh negara-negara liberal menimbulkan berbagai ekses. Berbagai persoalan tersebut muncul karena negara-negara liberal menguasai pasar ekonomi yang turut menyeret dan memaksa negara-negara yang belum berkembang untuk mengikuti manuver pasar ekonomi liberal (neoliberalisme) tersebut. Sedangkan negara-negara yang belum siap untuk terjun ke dalam ekonomi liberal tersebut menjadi korban yang memunculkan sikap penolakan atas modernitas. Maka di sini terjadi benturan budaya dan peradaban yang melahirkan konflik-konflik berskala tinggi.

Semakin menguatnya dominasi negara dunia pertama dalam bidang ekonomi, maka, negara-negara dalam dunia ketiga merasa teralienasi karena tidak mampu masuk dalam persaingan global seperti itu. Proses modernisasi ekonomi tersebut mengakibatkan tercabutnya masyarakat pada negara-negara dunia ketiga dari akar-akar identitas lokal yang telah ditanam sejak lama. Ketercabutan tersebut menyisakan ruang kosong yang kemudian diisi oleh identitas agama yang nyata dalam gerakan berlabelkan fundamentalisme. Dan bukti nyata dalam benturan peradaban tersebut berpuncak pada peristiwa penyerangan terhadap menara kembar WTC. Apa yang terlihat jelas bagi teroris (*jihād*) bahwa sebelum 11 September, yang menanggung akibat ekonomi dari sebuah anarki internasional yang tidak demokratis dan berada di luar jangkauan kedaulatan demokrasi adalah bahwa sementara banyak orang di dunia pertama mendapat keuntungan dari pasar bebas dalam bentuk kapital, tenaga kerja dan produk, pasar-pasar anarkis ini membiarkan sebgaiian besar rakyat di dunia ketiga tidak terlindungi. Persoalan inilah yang menciptakan jurang antara dunia pertama (negara-negara Eropa dan Amerika) dengan negara-negara dunia ketiga (khususnya negara yang melahirkan teroris). Dapat dikatakan bahwa penyerangan 11 September 2001 merupakan puncak kebencian para teroris terhadap Amerika. Para teroris yang digawangi oleh Osama Bin Laden bertanggung jawab atas serangan tersebut dan serangan tersebut merupakan sebuah perwujudan ideologi eksplisit atas penolakan terhadap modernitas dan sekularitas.³ Peristiwa penyerangan ini meminta perhatian banyak pihak. Tidak sedikit diskusi terjadi untuk membahas penyebab serangan tersebut ataupun untuk meminta pendapat terhadap serangan bereskalasi tinggi tersebut. Hal tersebut juga tidak luput dari perhatian seorang filsuf politik besar abad ini, Juergen Habermas⁴ yang memberikan fokus pada agama dalam ruang publik (*religion in the public sphere*).

³ Fundamentalisme yang mencirikan gerakan kaum teroris tidak mengenal kompromi. Hal ini disebabkan karena suatu ketakutan akan tercabutnya gaya-gaya hidup kaum tradisional. Ketakutan tersebut tidak lain akibat dari ekspansi investasi asing yang langsung yang didominasi oleh negara-negara Eropa.

⁴ kosepsi tentang *civil society* harus dilihat pada *the public sphere* (ruang publik yang bebas) di mana setiap individu warga negara dapat dan berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan penerbitan yang berkenaan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Ruang publik

Menurut Habermas seruan perang terhadap teroris merupakan suatu kekeliruan besar secara normatif dan pragmatis. Secara normatif ia mengangkat penjahat tersebut ke status musuh perang dan secara pragmatis kita tidak dapat melancarkan perang terhadap sebuah jaringan jika istilah perang harus mempertahankan suatu arti tertentu yang mana pun. Aksi teroris ke WTC yang menewaskan banyak orang menjadi tanda lahirnya masalah sosial yang baru di era-modern. Di tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan suatu fundamentalisme juga tumbuh. Dengan demikian keduanya ada berdampingan. Modernitas yang ditandai dengan kemajuan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan membawa relasi yang buruk dengan kaum fundamentalisme. Ketiadaan diskursus antara keduanya menimbulkan distorsi komunikasi yang berpuncak pada tragedi tersebut. Jürgen Habermas berpendapat, bahwa seluruh permasalahan sosial yang timbul diakibatkan oleh satu sebab yang sebenarnya sangat sederhana, yakni karena distorsi komunikasi, atau karena terjadinya “gangguan” terhadap proses komunikasi, sehingga yang tercipta bukanlah konsensus ataupun saling pengertian, melainkan prasangka dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, solusi dari berbagai bentuk problem sosial adalah dengan menciptakan proses komunikasi yang bebas distorsi.

Pergumulan dengan “teori interaksi komunikatif” Habermas menyingkapkan beberapa peluang bagi dialog antar budaya, agama,⁵ dan juga ilmu pengetahuan yang menjadi persoalan masyarakat modern. Dialog seperti itu diharapkan tidak menghasilkan keterpinggiran agama dari kehidupan sosial, tapi melahirkan rasa saling menghargai peran dan posisi masing-masing guna membangun sebuah masyarakat yang lebih manusiawi,⁶ demokratis dan menghargai hak-hak asasi manusia. Agama dan modernitas sering diperlawankan. Modernitas dianggap anti-tesis agama. Pendapat semacam ini lambat laun terbantahkan oleh fakta bahwa agama ternyata masih hidup di mana-mana. Agama hidup di tengah modernitas. Apa yang salah? Agama adalah bagian dari perkembangan manusia itu sendiri. Ia adalah salah satu bentuk evolusi pemikiran manusia. Agama adalah kategori universal dari pengalaman manusia. Dalam kaitannya dengan modernitas, agama tidak mesti diperlawankan. Agama adalah bagian dari modernitas itu sendiri. Untuk itu, dialog rasional merupakan salah satu basis penting guna mewujudkan kehidupan bersama secara damai antar umat manusia dengan latar belakang asal, iman, bahasa dan budaya yang berbeda-beda.⁷ Bukan bahasa senjata, melainkan senjata bahasa yang dibutuhkan. Dan senjata bahasa

dapat diartikan sebagai wilayah bebas semua warga negara memiliki akses penuh dalam kegiatan yang bersifat publik. Model dan panangan Habermas dalam civil society sama dengan mazhab Gramscian dan Tocquevillian dalam memberikan inspirasi pembentukan demokrasi, sebagai prasyarat mutlak dalam pembentukan civil society. lihat M. Dawan Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Pedrubahan Sosial*, Jakarta, LP3ES, 1999

⁵ Habermas memberikan model pertama ia namakan *Verdrängungsmodell*. Menurut paradigma ini, agama dalam masyarakat modern akan lenyap dan posisinya akan digantikan oleh ilmu pengetahuan dan ideologi kemajuan masyarakat modern. Model yang kedua dikenal sebagai *Enteignungsmodell*. Di sini, sekularisasi dan modernitas dianggap sebagai musuh agama karena ia telah melahirkan kejahatan-kejahatan moral. Para pelaku aksi teroris 11 September 2001 bertolak dari pemahaman seperti ini tentang sekularisasi dan ingin membangun kembali “moralitas” agama dengan jalan kekerasan

⁶ Meminjam istilah yang dipakai oleh M. Amin Abdullah: “Humanisme Religius versus Humanisme Sekular Menuju sebuah Humanisme Spiritual....” Lihat: Abu Hafsin (ed.), *Islam dan Humanisme Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 186 -203

⁷ Mansour Fakih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 58-63

itu tidak pernah boleh digunakan untuk mematikan lawan. Dialog tidak boleh menghasilkan kubu yang kalah dan yang menang. Tujuan dialog adalah menjelaskan rasionalitas kehidupan bersama sehingga semua orang bisa setuju atau mencapai sebuah konsensus rasional.

Maraknya aksi terorisme yang bernuansa agama akhir-akhir ini, termasuk di negeri kita, menantang kita untuk merefleksikan dan merumuskan kembali posisi dan makna agama-agama dalam dunia modern yang kian tersekularisasi. Sekularisasi terungkap antara lain dalam fenomena kian terdesaknya agama ke dalam ruang privat. Agama tidak punya peran lagi di ruang publik seperti halnya dalam teokrasi. Urusan publik menjadi tanggung jawab negara⁸. Di Barat, lembaga-lembaga agama seperti gereja tidak lagi menempati posisi sentral dalam masyarakat. Suara-suara lembaga agama menyangkut dampak etis dari persoalan-persoalan publik seperti aborsi, euthanasia, kurang mendapat respons yang wajar dari negara. Tugas untuk mencari solusi atas masalah-masalah ini mulai diambil alih oleh ilmu pengetahuan. Keterpinggiran agama dalam masyarakat modern melahirkan konflik antara agama dan ilmu pengetahuan. Sekularisasi dipandang sebagai musuh agama. Betulkah demikian? Atau adakah alternatif lain yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan konflik tersebut?

C. Agama dan Akal

Diskursus tentang agama dan kedudukan serta perannya dalam masyarakat demokratis-sekular serta bagaimana peran ilmu pengetahuan dalam dunia modern ini dapat dilihat dari pandangan sosok seorang filsafat kontemporer Juergen Habermas yang berangkat dari pertanyaan termasyur yang dikemukakan Ernst Wolfgang Bockenforde⁹ pada pertengahan tahun 1960-an: *"Does the free, secularized state exist on the basis of normative presuppositions that itself cannot guarantee"* Atau kalau dipertajam lagi, pertanyaannya menjadi: Apakah sistem negara demokratis-sekular mampu dari kekuatannya sendiri terus memperbarui pengandaian-pengandaian normatif yang diperlukan untuk bertahan? Tidakkah untuk itu ia tergantung pada kekayaan tradisi-tradisi kolektif Etis-religius?¹⁰

Konsep negara demokratis-sekular yang dimaksud di sini mengacu pada bentuk khusus dari liberalisme, yaitu paham republikanisme kantian. Paham ini meletakkan dasar-dasar normatif bagi negara demokratis tidak dengan mengacu pada tradisi religius tertentu dan tidak pula berdasarkan paham metafisika tertentu. Justifikasi yang diberikan dilandasi

⁸ Lukman S. Thahir, "Ke Arah Pembentukan Teori Pembebasan Dalam Islam (Etika Diskursus Jurgen Habermas)" dalam buku: *Studi Islam Interdisipliner: Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologis, dan Sejarah*, Yogyakarta: Qirtas, 2004, hlm. 77-84

⁹ Dikutip oleh Habermas dalam artikelnya "Pre-political Foundations of the Democratic Constimtion State?" dalam Jürgen Habermas / Joseph Ratzinger, *Dialectics of Secularisation*, hlm.. 21-52, khususnya hlm.. 21.

¹⁰ Sebagian tanggapan dimuat bersama terjemahan diskusi Habermas dan Ratzinger dalam Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko (eds.), *Dialektika Sekularisasi: Diskusi Habermas – Ratzinger dan Tanggapan*, Yogyakarta: Penerbit Lamalera (kerjasama dengan Penerbit Ledalero), 2010. Tanggapan dan versi terjemahan lain juga diterbitkan dalam Giancarlo Bosetti (ed.), *Iman Melawan Nalar: Perdebatan Joseph Ratzinger melawan Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009. Lihat juga teks pidato Studium Generale Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 16 Agustus 2010, oleh Ignas Kleden, "Masyarakat *Post-Secular*: Tuntutan Aktualisasi Relasi Akal dan Iman", dimuat dalam BASIS, No. 09 – 10, Tahun ke-59, 2010, h. 4 – 11. Pidato Ignas Kleden itu sudah memberi ringkasan menyeluruh jalannya dialog Habermas-Ratzinger, sehingga saya tidak perlu masuk lebih rinci ke dalam dialog itu sendiri, tetapi mengambil beberapa rajutan tematisnya untuk mengembangkan lebih jauh gagasan tentang *post-secular*.

pandangan filosofis yang bersifat post-metafisika. *"This theory is in the tradition of a rational law that renounces the strong cosmological or salvation-historical assumptions of the classical and religious theories of the natural law."*¹¹ Peran sejarah teologi Kristiani Abad Pertengahan, khususnya skolastisme Spanyol, bagi lahirnya paham tentang hak asasi manusia tentu saja tidak disangkal. Tetapi basis sesungguhnya bagi legitimasi negara hukum demokratis modern diambil dari pemikiran filosofis (profan) dari abad ke-17 dan ke-18.

Pendasaran kognitif bagi legitimasi yang dimaksud itu paling tidak meliputi dua hal berikut. Pertama, proses demokratis bagi penentuan hukum harus bersifat "inclusive" dan "discursive". Kalau demikian, dapat diandaikan bahwa hasilnya secara rasional akan dapat diterima. Kedua, proses demokratis itu sekaligus berjalan bersamaan dengan prinsip pengakuan atas hak asasi manusia. Artinya, dalam proses penentuan hukum secara demokratis itu dituntut, bahwa *"the basic liberal and political rights"* setiap orang sungguh terjamin. Kalau itu terlaksana, maka dapat diandaikan bahwa *"the constitution of the liberal state can satisfy its own need for legitimacy in a self-sufficient manner....."*¹² Persoalan menjadi sedikit berbeda kalau kita beralih dari tataran kognitif ke tataran motivasi. Yang dimaksudkan adalah bahwa ada sejumlah hal yang diperlukan bagi berfungsinya sebuah negara hukum-demokratis, tetapi tidak dapat dipaksakan oleh hukum. Memberikan suara dalam pemilihan umum serta solidaritas dengan satu sama lain adalah hal-hal yang perlu, tetapi tidak dapat dipaksakan oleh hukum. Kesediaan untuk menolong dan membela warga yang asing dan anonim, kesediaan untuk berkorban bagi kepentingan banyak orang adalah perlu, tetapi hanya dapat disarankan, dianjurkan, tidak dapat dipaksakan. *"This is why political virtues ... are essential if a democracy is to exist."*¹³

Tetapi untuk itupun - demikian Habermas - negara hukum-demokratis modern tidak perlu berpaling pada sumber lain. Kalau berjalan dengan baik dan ideal, praksis demokrasi dapat mengembangkan dinamika politisnya sendiri yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi masalah yang dihadapi jauh lebih serius. Modernisasi secara keseluruhan nampaknya berjalan salah arah. Dalam proses itu solidaritas yang diperlukan bagi berjalannya negara demokratis (tetapi tidak dapat & paksakan oleh hukum) nampak makin tipis, bahkan lenyap. Warga masyarakat berubah menjadi monade-monade yang terisolasi satu sama lain, yang bertindak hanya demi kepentingan sendiri. Hak masing-masing dipakai sebagai senjata untuk saling melawan satu sama lain. Pada tataran yang lebih luas dan global hal itu nampak dalam tidak adanya kontrol politis atas dinamika ekonomi global. Habermas menunjuk khususnya pada kepentingan pasar yang belum mengalami demokratisasi sebagaimana halnya negara dan karena itu mendominasi wilayah kehidupan lain. Proses demokrasi tidak berjalan. Dan kalau pun masih dapat berfungsi pada tingkat nasional, seringkali tidak berdaya berhadapan dengan korporasi yang bergerak internasional, supra-nasional. *"The dwindling of any genuine hope that the global community would be a creative*

¹¹ Jurgen Habermas, *Pre-political Foundations*,,,, hlm. 21

¹² Jurgen Habermas, *Pre-political Foundations*,,,, hlm. 24

¹³ Jurgen Habermas, *Pre-political Foundations*,,,, hlm. 26-27

political force encourages the tendency to depolitize the citizen."¹⁴ Ditambah dengan makin akutnya problem ketidakadilan sosial, jelaslah bahwa proyek modernisasi sedang ada dalam bahaya, berjalan pada rel yang keliru.

Pemecahan yang ditawarkan teori-teori postmodern ditolak Habermas, karena kritik mereka terhadap paham akal budi modern terlalu radikal. Mereka memandang masalah yang dihadapi sebagai *"logical outcome of the program of a self-destructive intellectual and societal rationalization."*¹⁵ Juga ditolak Habermas munculnya kembali sikap skeptis radikal dari kalangan Kristiani atas akal budi modern yang menawarkan pemecahan mudah berbau fideistis, dengan mengatakan bahwa obat yang mujarab terletak pada orientasi religius pada yang transenden. Sebagaimana jelas juga dari berbagai tulisan lain, Habermas tetap yakin berpegang pada sikap untuk meneruskan proses modernisasi, tetapi tentu saja dengan koreksi. Kritiknya terhadap akal budi modern tidak total. Di sini kiranya Habermas melihat perlunya memberi perhatian pada agama; bukan semata-mata sebagai fakta yang secara sosial ternyata masih ada. *"Philosophy must take this phenomenon seriously from within..... as a cognitive challenge."*¹⁶

Karena itu perlulah filsafat mengembangkan sikap mau belajar dari agama *"not only for functional reasons, but also . . . for substantial reason."* Dan itu sebenarnya bukan hal yang baru. Sejarah panjang perjumpaan kekristenan dengan Filsafat Yunani, menurut Habermas, tidak hanya menghasilkan teologi dogmatik dan helenisasi kekristenan. Sebaliknya, perjumpaan itu juga menyebabkan bahwa gagasan-gagasan Kristiani diterima dalam sistem-sistem pemikiran filosofis. Hal itu tampak dalam konsep-konsep normatif seperti: tanggungjawab, otonomi dan pembenaran, sejarah dan memoria, emansipasi dan pemenuhan, individualitas dan sosialitas, dan lain-lain. Memiliki asal-usulnya dalam dunia religius, konsep-konsep itu ditransformasikan, tanpa mengosongkan maknanya sama sekali.¹⁷

Mengingat terancamnya nilai solidaritas oleh karena dominasi kepentingan pasar, perlulah berdialog dengan segala macam sumber kultural yang memiliki potensi untuk membangkitkan solidaritas. Seperti kemudian sering dikatakannya, Habermas menegaskan bahwa berkaitan dengan itu agama memiliki potensi semantik yang masih harus digali. *"Tradisi-tradisi religius adalah sumber, dari padanya akal budi... dapat menimba kekayaan, dan akal budi sekular memiliki kemampuan dan tugas untuk menerjemahkan isi dari tradisi religius ke dalam sistem bahasanya sendiri."*

Baik dari pihak agama maupun dari pihak akal budi (*common sense*) sekular dituntut sikap yang tepat. Di satu pihak, dari pihak agama dituntut untuk menepati norma-norma

¹⁴ Jurgen Habermas, *Pre-political Foundations*,,,, hlm. 27-28

¹⁵ Jurgen Habermas, *Pre-political Foundations*,,,, hlm. 30

¹⁶ Jurgen Habermas, *Pre-political Foundations*,,,, hlm. 35-36

¹⁷ Meminjam apa yang disampaikan oleh Ratzinger menunjuk pada fakta terorisme. Selain berbagai faktor penyebab yang lain adalah memprihatinkan bahwa tindakan teror ternyata diberi legitimasi moral. Lebih dari itu, terorisme ternyata juga memiliki motif religius. Kalau demikian, Apakah agama itu sebuah kuasa yang menyembuhkan dan menyelamatkan? Atau lebih merupakan kuasa yang berasal dari jaman kuno dan berbahaya? Yang memiliki klaim yang keliru atas universalitas dan karena itu menyebabkan intoleransi dan teror? Tidakkah agama harus dituntun oleh akal budi dan dibatasi wewenangnya? Tetapi siapa dan bagaimana dapat melakukannya? ... Tidakkah diatasinya agama secara bertahap harus dilihat sebagai langkah maju kemanusiaan yang perlu, agar ia sampai pada jalan kebebasan dan toleransi yang universal.

proses demokratis serta memenuhi tuntutan refleksi akal budi modern. Berhadapan dengan kenyataan perkembangan pengetahuan, posisi netral negara serta prinsip kebebasan beragama, agama dituntut melepaskan klaim sebagai satu-satunya pemilik otoritas untuk menafsirkan dan menentukan cara hidup yang legitim. Ini tidak berarti, bahwa agama dipaksa dikurung dalam ruang privat saja. Kemungkinan untuk memberi pengaruh bagi masyarakat tetap terbuka. Tetapi hal itu hanya dapat dilakukan dengan mengikuti proses yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Di situ akal budi dapat memainkan peran yang penting. Di lain pihak, akal budi sekular perlu berefleksi diri untuk makin menyadari pula keterbatasan-keterbatasannya. Keyakinan-keyakinan religius perlu diakui sebagai yang memiliki status epistemis yang sah dan tidak semata-mata dipandang sebagai yang irasional.

Mengingat semua itu Ratzinger sependapat dengan Habermas, bahwa akal budi modern dan agama harus saling belajar satu sama lain. Masing-masing harus makin tahu akan batas-batasnya. Agama dan akal budi bersama-sama "dipanggil untuk saling memurnikan dan menolong satu sama lain. Keduanya saling membutuhkan". Menarik bahwa, Ratzinger mengingatkan tentang pentingnya dimensi interkulturalitas. Kendali memiliki pengaruh yang besar, baik akal budi sekular Barat maupun tradisi agama dalam kenyataannya tidak universal. Maka keduanya perlu dibuka pula pada budaya-budaya yang lain sebagai bentuk dalam membentuk pluralisme dalam beragama¹⁸.

D. Peran Moralitas Agama

Sebelum menggeluti konsep Habermas tentang kemungkinan dialog antar iman atau agama dengan ilmu pengetahuan dalam masyarakat modern, mungkin ada baiknya jika kita melihat relevansi teologis pemikiran Habermas tentang teori komunikasi. Habermas sesungguhnya bukan seorang religius meskipun berasal dari latar belakang keluarga protestan. Bahkan ayahnya adalah seorang pendeta protestan di kota kelahiran Habermas, Gummersbach, Jerman. Habermas menyebut dirinya, dengan meminjam ungkapan sosiolog Max Weber, sebagai seorang yang buta terhadap hal-hal religius (*der religiös Unmusikalische*). Ia juga menyangkal peran Tuhan sebagai dasar agama-agama. Kendati demikian, Habermas tetap mengakui peran agama untuk menciptakan arti dan makna kehidupan dalam sebuah dunia tersekularisasi selama modernitas belum menemukan alternatif lainnya.

Menurut Habermas kedua paradigma tentang sekularisasi di atas terlalu sempit dan bertentangan dengan kenyataan sebuah masyarakat "post-sekularisasi", di mana agama dan ilmu pengetahuan bisa hidup dan berdampingan. Untuk menghubungkan kedua posisi ini, Habermas menganjurkan sebuah posisi menengah yang ia sebut Commonsense yang rasional, demokratis dan semakin kuat. Iman yang terungkap dalam agama telah menerjemahkan dirinya ke dalam bahasa ilmu sekular. Dengan demikian, iman bersikap terbuka terhadap

¹⁸ Pernyataan Habermas, bahwa tradisi-tradisi religius monoteistis memiliki bahasa yang mempunyai potens semantik yang tidak tergantikan..., dan perlu digali dan diterjemahkan secara filosofis, karena kalau tidak suatu saat potens semantik itu tidak akan dapat dimengerti lagi. Lihat: Jiirgen Habermas, "Exkurs: Transzendenz von innen, Transzendenz ins Diesseits 3'in Jiirgen Habermas, *Texte und Kontexte* (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1992), SS. 127-156: 131. Dan, Jiirgen Habermas, *Nachmetaphysisches Denken*, S. 23.

setiap bentuk analisa kritis-rasional. Tapi itu saja belum cukup. Commonsense sebagai akal sehat yang menempati posisi menengah tidak bisa secara berat sebelah mendukung ilmu pengetahuan dan mengabaikan peran agama. Ia juga harus terbuka terhadap isi agama. Agar dalam setiap usaha menciptakan konsensus rasional,¹⁹ tidak meminggirkan agama secara tidak fair dari masyarakat umum dan tidak menutup sumber daya atau potensialitas agama bagi masyarakat sekular, maka pihak sekular pun harus tetap mempertahankan cita rasanya bagi daya artikulasi bahasa religius. Dan karena batasan antara argumentasi religius dan ilmu pengetahuan sering kabur, maka dituntut kesediaan dari kedua belah pihak untuk melihat persoalan dari sudut pandang pihak lain. Habermas tidak menghendaki penyingkiran makna religius yang potensial secara sekuler, tapi coba menerjemahkannya ke dalam konsep modern.

Terlepas apakah seseorang mengimani ajaran tentang manusia sebagai citra Allah, intuisi yang terkandung di dalamnya, dapat juga dimengerti oleh orang yang buta secara religius (*der religiös Unmusikalische*). Kebebasan cinta terungkap dalam rasa saling mengerti dan menghargai. Maka manusia sebagai gambaran Allah mesti bebas untuk membalas perhatian dan cinta Allah. Akan tetapi kebebasan manusia itu tidak boleh meniadakan sifatnya sebagai makhluk ciptaan. “Allah hanyalah Allah bagi manusia bebas sejauh perbedaan absolut antara pencipta dan ciptaan tidak dihilangkan.” Habermas memperlihatkan kebenaran ini sebagai berikut: Segala sesuatu yang diterjemahkan ke dalam permainan bahasa manusiawi menjadi objektif dan bisa digambarkan, tapi tidak mampu menggugah rasa dan tanggung jawab subjek dalam lingkup hidupnya. Manusia yang terobjektivasi adalah korban sebuah hubungan sebab-akibat. Ia bukan lagi subjek bebas yang secara spontan mampu bertindak secara bertanggung jawab. Dan di sinilah peran agama dalam masyarakat modern: menyelamatkan manusia sebagai subjek bebas dan bertanggung jawab.

Peran ini hanya bisa dimainkan agama-agama jika mereka bersikap terbuka terhadap peran kritis-rasional ilmu pengetahuan. Keterbukaan merupakan sumber legitimasi agama-agama dalam sebuah masyarakat modern. Habermas juga menyebutkan sumber legitimasi lainnya seperti kemampuan agama untuk berdialog dengan agama dan ideologi lain. Selain itu, agama-agama juga harus terbuka terhadap premis sebuah negara hukum yang mendasarkan dirinya pada moral sekuler.²⁰

Uraian Habermas tentang agama sangat berorientasi sosiologis. Ia coba mengungkap makna dari setiap pernyataan iman, mengomunikasikannya tanpa harus menentukan apakah

¹⁹ Habermas mengajarkan kita untuk selalu menempatkan kesepakatan legal-politis yang rasional sebagai sebuah otoritas yang lebih tinggi daripada relasi etnis, golongan, ras maupun agama. Di dalam negara dengan begitu banyak “bangsa”, ikatan yang paling mungkin diantara dua orang yang berasal dari latar belakang “bangsa” yang berbeda adalah ikatan legal politis, yang dibentuk melalui proses diskursus untuk mencapai kesepakatan yang rasional. Hanya dengan kesadaran semacam itulah masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai “bangsa” tapi satu “negara”, dapat tetap hidup bersama dengan stabil dan dinamis. Tesis ini disebut Habermas sebagai patriotisme konstitusional.

²⁰ Meminjam analisis Habermas, bahwa di dalam masyarakat modern yang plural, norma-norma sosial yang diberlakukan hanya dapat meraih validitasnya dari akal budi manusia. Hanya norma-norma yang didasarkan pada akal budi manusialah yang dapat mengikat interaksi diskursif antara kelompok dan individu yang berbeda-beda di dalam masyarakat plural. Dalam hal ini, Habermas sependapat dengan John Rawls, yang mengatakan bahwa di dalam masyarakat plural, kesepakatan hanya dapat dicapai, jika masing-masing pihak mau menekan kepentingan kelompoknya masing-masing, dan mencari irisan di antara kepentingan mereka.

isi iman itu benar atau tidak. Meskipun Habermas tidak menyentuh persoalan iman itu sendiri, ia bisa menghantar kita mendekati batas, di mana kita mesti mengambil keputusan dalam hal iman. Pemikiran Habermas juga merupakan sumbangan besar bagi dialog antar agama dan ilmu pengetahuan demi membangun sebuah masyarakat bermoral dan berkemanusiaan. Oleh karena itu, membicarakan persoalan pluralisme dan dialog antar-agama adalah setua usia manusia dan selamanya akan ada, tapi cara dan metode manusia dalam menghadapi dan menyikapi pluralisme itulah yang harus berubah, seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga yang diperlukan bukanlah “ideal-language” yang bersifat reduktif-positivistik, tetapi yang diperlukan adalah kepekaan baru yang lebih bersahaja untuk sepenuhnya menghargai keanekaragaman dan pluralisme kehidupan. Kepekaan semacam inilah yang pada akhirnya akan memunculkan pandangan pluralistik²¹.

E. Penutup

Sebelum sampai pada akhir tulisan ini, tentang “agama dalam ruang publik” dan “Agama dalam masyarakat modern” sebagaimana dalam pemikiran Jürgen Habermas merupakan dua sisi yang berbeda, tetapi memiliki substansi yang sama, di mana agama ditempatkan pada ruang publik bukan pada ruang privat, khusus dalam masyarakat modern yang selalu ditandai dengan demokrasi, sekularisasi, pluralisme menempatkan agama pada posisi untuk dilakukan pembacaan lain dan pendekatan pada interpretasi yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban modern. Sehingga agama dalam masyarakat modern harus dilihat pada (1) sekularisasi sebagai diferensiasi ranah-ranah sekular dari institusi dan norma-norma agama; (2) sekularisasi sebagai makin menurunnya kepercayaan dan praktik-praktik agama; dan (3) sekularisasi sebagai proses marjinalisasi agama ke dalam ranah yang diprivatisasikan. bahwa diferensiasi fungsional yang mendorong ke arah individualisasi agama tidak secara niscaya mengimplikasikan hilangnya pengaruh dan relevansi agama, baik dalam arena politik, budaya masyarakat, maupun tingkah laku sehari-hari. Berangkat dari pengalaman Eropa, Habermas.

Daftar Pustaka

- Abu Hafsini (ed.), *Islam dan Humanisme Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Giancarlo Bosetti (ed.), *Iman Melawan Nalar: Perdebatan Joseph Ratzinger Melawan Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Jürgen Habermas and Joseph Ratzinger, “The Dialectics of Secularization: On Reason and Religion,” Dallas: Ignatius Press, 2007.

²¹ Mengingat kenyataan pluralisme agama dan pluralisme sosial dapat dijumpai di mana-mana. Maka tak bisa lain, kehadiran pluralisme, baik sebagai konsep pengetahuan maupun sebagai sebuah teori adalah merupakan hal yang wajar adanya—bukan malah ditolak, apalagi diharamkan. Belum lagi jika dikaitkan antara nilai-nilai Islam dengan masalah keindonesiaan. Keterpaduan antara keislaman dan keindonesiaan ini sebagai perwujudan dari nilai-nilai Islam yang universal, berkaitan dengan tradisi lokal Indonesia. Inilah yang selalu ditekankan oleh almarhum Nurcholish Madjid [Cak Nur] Rahimahullah

Jürgen Habermas, "Exkurs: Transzendenz von innen, Transzendenz ins Diesseits" in Jürgen Habermas, *Texte und Kontexte* (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1992)

Lukman S. Thahir, *Studi Islam Interdisipliner: Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologis, dan Sejarah*, Yogyakarta: Qirtas, 2004

Mansour Fakih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

M. Dawan Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta, LP3ES, 1999

Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko (eds.), *Dialektika Sekularisasi: Diskusi Habermas – Ratzinger dan Tanggapan*, Yogyakarta: Penerbit Lamalera (kerjasama dengan Penerbit Ledalero), 2010

Samuel P. Huntington, *Benturan Antar peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Yogyakarta: Qalam, 2003.